



Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama

Issn: 2407-9146 (Print)

Issn: 2549-5666 (Online)

Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Ah>

Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama/Vol. 7, No. 1, 2021 (141-149)

PERAN NILAI DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI ISLAM

Haqiqi Rafsanjani

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Abstrak

Jurnal ini menjelaskan tentang peran nilai dalam pengembangan ekonomi islam. Di mulai dengan pengertian nilai. Dijelaskan dalam makalah ini bahwa nilai adalah sesuatu yang menarik bagi kita, sesuatu yang kita cari, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang disukai dan diinginkan, singkatnya, sesuatu yang baik. Dalam makalah ini dijelaskan juga nilai-nilai yang mewarnai ekonomi islam yakni: *Tauhid* (Keimanan), *'Adl* (Keadilan), *Nubuwwah* (Kenabian), *Khilafah* (Pemerintahan), dan *Ma'ad* (Hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proposisi-proposisi dan teori ekonomi islam. Dari kelima nilai-nilai universal tersebut, dibangunlah tiga prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri dan cikal bakal sistem ekonomi islam. Ketiga prinsip derivatif itu adalah *multitype ownership*, *freedom to act*, dan *social justice*. Di atas semua nilai dan prinsip yang telah diuraikan di atas, dibangunlah konsep yang memayungi kesemuanya, yakni konsep akhlak. Akhlak menempati posisi puncak, karena inilah yang menjadi tujuan islam dan dakwah para Nabi, yakni untuk menyempurnakan akhlak manusia.

Kata kunci: ekonomi islam, nilai, filsafat ekonomi islam

Latar Belakang

Setiap sistem ekonomi memiliki ciri khasnya masing-masing yang membentuk fondasinya, dari fondasinya itulah ia dapat dibedakan dan dikenali. Kapitalisme modern, yang muncul karena adanya industrialisasi yang cepat serta difasilitasi oleh kemajuan yang di capai oleh manusia dalam sains dan teknologi, didasarkan pada ide perekonomian pasar bebas, tanpa atau sedikit sekali campur tangan pemerintah di bidang ekonomi, bunga, dan perbankan. Sosialisme, yang muncul sebagai reaksi terhadap kapitalisme, menganut kontrol negara sepenuhnya terhadap perekonomian dan pemilikan alat produksi oleh negara atau masyarakat.

Feodalisme berarti pemilikan tanah oleh sedikit orang atau keluarga dan menjadikan mayoritas masyarakat sebagai penyewa atau pekerja yang menggarap tanah, baik sebagai budak para tuan tanah atau sekedar berbagi hasil pertanian.

Di sisi lain, Islam menganut keadilan dan kejujuran di lapangan ekonomi. Menurut Islam, manusia adalah khalifah atau wakil Tuhan dalam seluruh rencana Tuhan, dan telah diberi hak pemilikan terbatas atas alat-alat produksi. Islam mengakui adanya campur tangan negara dalam kegiatan ekonomi demi menjamin kesejahteraan warganya. Penghapusan bunga, pelebagaan sedekah dan zakat, konsep halal dan haram, distribusi kekayaan yang merata, dilarangnya penimbunan dan menekankan pentingnya sirkulasi kekayaan, konsen dengan kesejahteraan kaum miskin adalah ciri khas sistem ekonomi Islam.

Dari beberapa uraian di atas dapat diketahui bahwa pada sistem ekonomi kapitalis dan sosialis telah memisahkan antara agama dengan kegiatan ekonomi yang dijalankannya, sedangkan dalam ekonomi Islam dapat kita lihat bahwa segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia tidak boleh terpisahkan oleh nilai-nilai agama Islam. Oleh karena itu, dalam makalah ini penulis ingin menggali dan mendeskripsikan peran nilai dalam pengembangan ekonomi Islam.

Nilai

Tidak mudah untuk menjelaskan apa itu nilai. Setidak-tidaknya dapat dikatakan bahwa nilai merupakan sesuatu yang menarik bagi kita, sesuatu yang kita cari, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang disukai dan diinginkan, singkatnya, sesuatu yang baik. Menurut perkataan bagus filsuf Jerman-Amerika, Hans Jonas, nilai adalah *the addresse of a yes*, “sesuatu yang ditujukan dengan ‘ya’ kita”.¹ Memang, nilai adalah sesuatu yang kita iakan atau kita aminkan. Nilai selalu mempunyai konotasi positif. Sebaliknya, sesuatu yang kita jauhi, sesuatu yang membuat kita melarikan diri seperti penderitaan, penyakit, atau kematian adalah lawan dari nilai yaitu “non nilai” atau *disvalue*, sebagaimana dikatakan orang Inggris. Ada juga beberapa filsuf yang menggunakan di sini istilah “nilai negatif”, sedangkan nilai dalam arti tadi mereka sebut “nilai positif”²

Di pandang dalam perspektif sejarah filsafat yang sudah panjang, “nilai” merupakan suatu tema filosofis yang berumur agak muda. Baru pada akhir abad ke-19 tema ini mendapat kedudukan mantap dalam uraian-uraian filsafat akademis. Sekurang-kurangnya secara eksplisit. Tapi secara implisit nilai sudah lama memegang peranan dalam pembicaraan filsafat, sudah sejak Plato menempatkan ide “baik” paling atas dalam hierarki ide-ide. Dan sesudah Plato, kategori “baik” praktis tidak pernah lagi terlepas dari fokus perhatian filsafat, khususnya etika. Tapi baru kira-kira seabad yang lalu nilai mendapat tempat eksplisit dalam diskusi-

¹ K. Bertens, *Etika*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2001), hlm. 139.

² *Ibid.*

diskusi filsafat dan malah timbul suatu cabang filsafat yang baru dengan nama “aksiologi” atau “teori nilai”.³

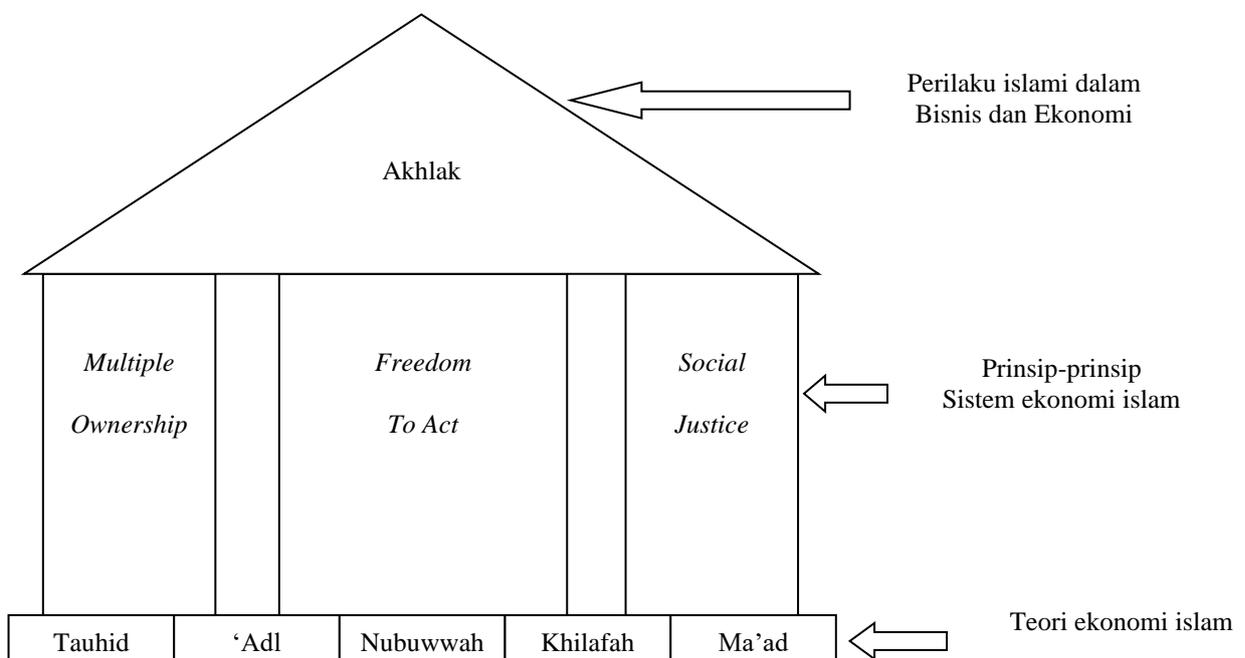
Nilai selalu berkaitan dengan penilaian seseorang, sedangkan fakta menyangkut ciri-ciri obyektif saja. Perlu di catat lagi bahwa fakta selalu mendahului nilai. Terlebih dahulu ada fakta yang berlangsung, baru kemudian menjadi mungkin penilaian terhadap fakta itu.

Berdasarkan analisis sederhana ini dapat kita simpulkan bahwa nilai sekurang-kurangnya memiliki tiga ciri berikut ini:

1. Nilai berkaitan dengan subyek. Kalau tidak ada subyek yang menilai, maka tidak ada nilai juga.
2. Nilai tampil dalam suatu konteks praktis, di mana subyek ingin membuat sesuatu. Dalam pendekatan yang semata-mata teoritis, tidak akan ada nilai. (hanya menjadi pertanyaan apakah suatu pendekatan yang secara murni teoritis bisa diwujudkan).
3. Nilai-nilai menyangkut sifat-sifat yang “di tambah” oleh subyek pada sifat-sifat yang dimiliki oleh obyek. Nilai tidak dimiliki oleh obyek pada dirinya. Rupanya hal itu harus dikatakan karena obyek yang sama bagi berbagai subyek dapat menimbulkan nilai yang berbeda-beda.⁴

Peran Nilai dalam Pengembangan Ekonomi Islam

Walaupun pemikiran para pakar tentang ekonomi islam terbagi-bagi ke dalam tiga mazhab, namun pada dasarnya mereka setuju dengan prinsip-prinsip umum yang mendasarinya. Prinsip-prinsip ini membentuk keseluruhan kerangka



³ *Ibid.*, hlm. 140.

⁴ *Ibid.*, hlm. 141.

ekonomi islam, yang jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan dapat divisualisasikan sebagai berikut:

Sumber: A. Karim, Adiwarmam. *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 34.

Bangunan ekonomi islam didasarkan atas lima nilai universal, yakni: *Tauhid* (Keimanan), *'Adl* (Keadilan), *Nubuwwah* (Kenabian), *Khilafah* (Pemerintahan), dan *Ma'ad* (Hasil).⁵ Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proposisi-proposisi dan teori-teori ekonomi islam.

Namun, teori yang kuat dan baik tanpa diterapkan menjadi sistem, akan menjadikan ekonomi islam hanya sebagai kajian ilmu saja tanpa memberi dampak pada kehidupan ekonomi. Oleh karena itu, dari kelima nilai-nilai universal tersebut, dibangunlah tiga prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri dan cikal bakal sistem ekonomi islam. Ketiga prinsip derivatif itu adalah *multitype ownership*, *freedom to act*, dan *social justice*.⁶

Di atas semua nilai dan prinsip yang telah diuraikan di atas, dibangunlah konsep yang memayungi kesemuanya, yakni konsep akhlak. Akhlak menempati posisi puncak, karena inilah yang menjadi tujuan islam dan dakwah para Nabi, yakni untuk menyempurnakan akhlak manusia.⁷ Akhlak inilah yang menjadi panduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan aktivitasnya.

Nilai-nilai Universal

Nilai-nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk membangun teori-teori ekonomi islam, rincianya:

A. Tauhid (Keesaan Tuhan)

Tauhid merupakan fondasi ajaran islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa “tiada sesuatu pun yang layak disembah selain Allah,” dan “tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain dari pada Allah”⁸ karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya⁹ dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Oleh karena itu, Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanya di beri amanah untuk “memiliki” untuk sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka.

Dalam islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan.¹⁰ Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepadaNya.¹¹ Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam (sumber daya) dan manusia (*mu'amalah*) di bingkai dengan kerangka hubungan

⁵ A. Karim, Adiwarmam. *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 34.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Innama bu 'itstu li utammima makaarimal akhlaq*, Al-Hadits.

⁸ QS 2:107, 5:17, 120, 24:33.

⁹ QS 6:1-3.

¹⁰ QS 23:115.

¹¹ QS 51:56.

dengan Allah. Karena kepadaNya kita akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.

B. ‘Adl (Keadilan)

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifatNya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhlukNya secara zalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi¹² harus memelihara hukum Allah di bumi, dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat dari padanya secara adil dan baik.

Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil.¹³ Dalam islam adil didefinisikan sebagai “tidak menzalimi dan tidak dizalimi.” Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkelompok-kelompok dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia.¹⁴ Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar dari pada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusanya.¹⁵

C. Nubuwwah (Kenabian)

Karena rahman, rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. Karena itu diutuslah para nabi dan rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubah) ke asal-muasal segala, Allah. Fungsi rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat.¹⁶ Untuk umat muslim, Allah telah mengirimkan “manusia model” yang terakhir dan sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Sifat-sifat utama sang model yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi dan bisnis pada khususnya, adalah sebagai berikut:

- *Siddiq* (benar, jujur)

Dari konsep *siddiq* ini, muncullah konsep turunan khas ekonomi dan bisnis, yakni efektivitas (mencapai tujuan yang tepat, benar) dan efisiensi (melakukan kegiatan dengan benar, yakni menggunakan teknik dan metode yang tidak menyebabkan kemubaziran. Karena kalau mubazir berarti tidak benar).

- *Amanah* (tanggung jawab, kepercayaan, kredibilitas)

¹² QS 2:30.

¹³ QS 49:9, 60:8, 5:42, 31:17, 3:104, 8:73, 8:25.

¹⁴ QS 25:20.

¹⁵ QS 89:20.

¹⁶ QS 33:21, 59:7, 60:4.

Kumpulan individu dengan kredibilitas dan tanggung jawab yang tinggi akan melahirkan masyarakat yang kuat, karena dilandasi oleh saling percaya antar anggotanya. Sifat amanah memainkan peranan yang fundamental dalam ekonomi dan bisnis, karena tanpa kredibilitas dan tanggung jawab, kehidupan ekonomi dan bisnis akan hancur.

- *Fathanah* (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektual)

Implikasi ekonomi dan bisnis dari sifat ini adalah bahwa segala aktivitas harus dilakukan dengan ilmu, kecerdikan dan pengoptimalan semua potensi akal yang ada untuk mencapai tujuan. Jujur, benar, kredibel dan bertanggungjawab saja tidak cukup dalam berekonomi dan berbisnis. Para pelaku harus pintar dan cerdik supaya usahanya efektif dan efisien, dan agar tidak menjadi korban penipuan.

- *Tabligh* (komunikasi, keterbukaan, pemasaran)

Sifat ini bila sudah mendarah daging pada setiap muslim, apalagi yang bergerak dalam bidang ekonomi dan bisnis, akan menjadikan setiap pelaku ekonomi dan bisnis sebagai pemasar-pemasar yang tangguh dan lihai. Karena sifat *Tabligh* menurunkan prinsip-prinsip ilmu komunikasi (personal maupun massal), pemasaran, penjualan, periklanan, pembentukan opini massa, *open management*, iklim keterbukaan dan lain-lain.

D. Khilafah (Pemerintahan)

Dalam islam, pemerintah memainkan peranan yang kecil, tetapi sangat penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah, dan untuk memastikan supaya tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia.¹⁷ Semua ini dalam kerangka mencapai *maqashid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syariah), yang menurut Imam Al-Ghazali adalah untuk memajukan kesejahteraan manusia. Hal ini di capai dengan melindungi keimanan, jiwa, akal, kehormatan, dan kekayaan manusia.

E. Ma'ad (Hasil)

Walaupun sering kali diterjemahkan sebagai “kebangkitan”, tetapi secara harfiah ma'ad berarti “kembali.” Karena kita semua akan kembali kepada Allah.¹⁸ Hidup manusia bukan hanya di dunia, tetapi terus berlanjut hingga alam setelah dunia (akhirat). Pandangan dunia yang khas dari seorang muslim tentang dunia dan akhirat dapat dirumuskan sebagai: “Dunia adalah ladang akhirat.” Artinya, dunia adalah wahana bagi manusia untuk bekerja dan beraktivitas (beramal shaleh). Namun demikian, akhirat lebih baik dari dunia,¹⁹ karena itu Allah melarang kita untuk terikat pada dunia,²⁰ sebab jika dibandingkan dengan kesenangan akhirat, kesenangan dunia tidaklah seberapa.²¹

¹⁷ Dalam sejarah perekonomian islam, kita temukan sebuah institusi khusus bernama *hisbah* yang di buat untuk mencapai tujuan ini.

¹⁸ QS 96:8, 86:4, 2:156, 21:93, 23:60.

¹⁹ QS 87:17, 13:26, 4:77, 17:21.

²⁰ QS 31:33, 3:185, 6:32, 13:26.

²¹ QS 9:38, 13:26.

Prinsip-prinsip Derivatif

Kelima nilai yang telah diuraikan di atas menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori dan proposisi ekonomi islami. Seperti sudah dibicarakan di muka, dari kelima nilai ini kita dapat menurunkan tiga prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri sistem ekonomi islami. Prinsip derivatif tersebut uraiannya adalah sebagai berikut.

A. *Multitype Ownership* (Kepemilikan Multijenis)

Nilai tauhid dan nilai adil melahirkan konsep *multitype ownership*. Dalam sistem kapitalis, prinsip umum kepemilikan yang berlaku adalah kepemilikan swasta. Dalam sistem sosialis, kepemilikan negara. Sedangkan dalam islam, berlaku prinsip kepemilikan multijenis, yakni mengakui bermacam-macam bentuk kepemilikan, baik oleh swasta, negara atau campuran.

Prinsip ini adalah terjemahan dari nilai tauhid: pemilik primer langit, bumi dan seisinya adalah Allah, sedangkan manusia di beri amanah untuk mengelolanya. Jadi manusia di anggap sebagai pemilik sekunder. Dengan demikian, konsep kepemilikan swasta di akui. Namun, untuk menjamin keadilan, yakni supaya tidak ada proses penzaliman golongan orang terhadap segolongan yang lain, maka cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dengan demikian, kepemilikan negara dan nasionalisasi juga diakui.

B. *Freedom to act* (Kebebasan Bertindak/Berusaha)

Keempat nilai nubuwah bila digabungkan dengan nilai keadilan dan nilai khilafah (*good governance*) akan melahirkan prinsip *freedom to act* pada setiap muslim, khususnya pelaku bisnis dan ekonomi. *Freedom to act* setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian. Karena itu, mekanisme pasar adalah keharusan dalam islam, dengan syarat tidak ada distorsi (proses penzaliman), *riba*, *gharar*, *tadlis*, *maysir*.

Negara bertugas menyingkirkan atau paling tidak mengurangi *market distortion* ini. Dengan demikian, negara/pemerintah bertindak sebagai wasit yang mengawasi interaksi (mu'amalah) pelaku-pelaku ekonomi dan bisnis dalam wilayah kekuasaannya untuk menjamin tidak dilanggarnya syariah, supaya tidak ada pihak-pihak yang zalim atau terzalimi, sehingga tercipta iklim ekonomi dan bisnis yang sehat.

C. *Social Justice* (Keadilan Sosial)

Gabungan nilai khilafah dan nilai ma'ad melahirkan prinsip keadilan sosial. Dalam islam, pemerintah bertanggungjawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan keseimbangan sosial antara yang kaya dan yang miskin.

Semua sistem ekonomi mempunyai tujuan yang sama yaitu menciptakan sistem perekonomian yang adil. Namun tidak semuanya sistem tersebut mampu dan

secara konsisten menciptakan sistem yang adil. Sistem yang baik adalah sistem yang dengan tegas dan secara konsisten menjalankan prinsip-prinsip keadilan. Dalam sistem sosialis, keadilan akan terwujud apabila masyarakatnya dapat menikmati barang dan jasa dengan sama rasa dan sama rata. Sedangkan dalam sistem kapitalis, adil apabila setiap individu mendapatkan apa yang menjadi haknya. Sedangkan dalam islam, keadilan diartikan dengan saling ridho dan satu pihak tidak menzalimi pihak lain.

Akhlahk

Sekarang kita telah memiliki landasan teori yang kuat, serta prinsip-prinsip sistem ekonomi islami yang mantap. Namun, dua hal ini belum cukup karena teori dan sistem menuntut adanya manusia yang menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam teori dan sistem tersebut. Dengan kata lain, harus ada manusia yang berperilaku, berakhlak secara profesional (*ihsan*, *itqan*) dalam bidang ekonomi. Baik dalam posisi sebagai produsen, konsumen, pengusaha, karyawan atau sebagai pejabat pemerintah.

Karena teori yang unggul dan sistem-sistem ekonomi yang sesuai syariah sama sekali bukan merupakan jaminan bahwa perekonomian umat islam akan otomatis maju. Sistem ekonomi islam hanya memastikan bahwa tidak ada transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syariah. Tetapi kinerja bisnis tergantung pada *man behind the gun*-nya. Karena itu pelaku ekonomi dalam kerangka ini dapat saja di pegang oleh umat non-muslim. Perekonomian umat islam baru dapat maju bila pola pikir dan pola laku muslimin dan muslimat sudah *itqan* (tekun) dan *ihsan* (profesional). Ini mungkin salah satu rahasia sabda Nabi SAW: “Sesungguhnya aku di utus untuk menyempurnakan akhlak.” Karena akhlak (perilaku) menjadi indikator baik-buruknya manusia. Baik buruknya perilaku bisnis para pengusaha menentukan sukses-gagalnya bisnis yang dijalankannya.

Kesimpulan

Beberapa uraian dari pembahasan mengenai peran nilai dalam pengembangan ekonomi islam, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bangunan ekonomi islam didasarkan atas lima nilai universal, yakni: *Tauhid* (Keimanan), *Adl* (Keadilan), *Nubuwwah* (Kenabian), *Khilafah* (Pemerintahan), dan *Ma'ad* (Hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proposisi-proposisi dan teori ekonomi islam.
2. Dari kelima nilai-nilai universal tersebut, dibangunlah tiga prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri dan cikal bakal sistem ekonomi islam. Ketiga prinsip derivatif itu adalah *multitype ownership*, *freedom to act*, dan *social justice*.
3. Di atas semua nilai dan prinsip yang telah diuraikan di atas, dibangunlah konsep yang memayungi kesemuanya, yakni konsep akhlak. Akhlak menempati posisi

puncak, karena inilah yang menjadi tujuan islam dan dakwah para Nabi, yakni untuk menyempurnakan akhlak manusia.

Daftar Pustaka

- A. Karim, Adiwarmanto. 2010. *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Bertens, K. 2001. *Etika*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.